

ABSTRAK

Di Kabupaten Grobogan masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti dan fungsi sertifikat tanah maupun prosedur untuk memperoleh sertifikat tanah tersebut. Karena di Kabupaten Grobogan masih terdapat tanah-tanah dengan status hak milik yang sampai sekarang belum didaftarkan sehingga pemiliknya belum memperoleh sertifikat. Oleh karena itu status tanah maupun alat buktinya masih banyak yang berpegang pada ketentuan lama di kantor pertanahan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Grobogan, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini dilaksanakan di BPN Grobogan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan studi lapangan, pengolahan data dilakukan dengan cara kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, belum tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah menawarkan program PRONA (Proyek Nasional Agraria) dan melaksanakan program sertifikat massal atau swadaya.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran, Tanah

ABSTRACT

In Grobogan Regency there are still many people who do not understand the meaning and function of land certificates and procedures for obtaining the land certificate. Because in Grobogan Regency there are still lands with ownership rights that have not yet been registered so that the owners have not yet obtained a certificate. Therefore, there are still many land status and evidence tools that adhere to the old provisions in the land office of Grobogan Regency. This study aims to find out how the implementation of land registration in Grobogan Regency, as well as what factors are obstacles in the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 and how the solution is.

This research was conducted at Grobogan BPN. This study uses a sociological juridical approach. The type of research used is descriptive research. The data used are primers obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials where data collection is done by means of library studies, document studies and field studies, data processing is done in a quantitative way.

Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of land registration in Grobogan Regency is in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997. It is known that the factors that become obstacles are the low economic level of the community, the lack of public awareness about the importance of registering the land. Therefore, the government should offer a PRONA (National Agrarian Project) program and implement a mass or self-supporting certificate program.

Keywords: *Implementation, Registration, Land*